

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional pada dasarnya merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan yang terjadi antar negara. Tidak hanya itu, hubungan internasional juga memiliki beberapa definisi lainnya seperti bidang yang berdiri yang membahas aspek-aspek internasional dari beragam cabang ilmu pengetahuan, sejarah politik internasional baru, seluruh aspek internasional dari kehidupan sosial manusia termasuk kemampuan mempengaruhi sikap negara lain, dan juga cabang ilmu yang dapat berdiri sendiri. Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara. Saat ini Hubungan internasional sudah mulai meluas ke bidang tidak hanya politik melainkan lainnya seperti ekonomi, budaya, keamanan, dan lain-lain. Interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, pembentukan aliansi, konflik, bahkan hingga perang (Darmayadi, 2015).

Pada abad ke-19 masih terlihat bahwa hubungan internasional hanya fokus pada permasalahan perang dan perdamaian, namun pada perkembangannya hubungan internasional

mulai melebarkan cakupannya hingga ke masalah kerjasama ekonomi bangsa-bangsa, upaya menghilangkan kemiskinan global, memahami ketimpangan sosial antar kelompok negara maju dan negara kurang maju, upaya melawan kriminalitas dunia, upaya menghindari dan menyelesaikan konflik, aspek hak asasi manusia, lingkungan dan sebagainya. Hubungan internasional juga mengalami perkembangan dalam segi aktor yang awalnya hanya sebatas negara menjadi muncul aktor non negara baik organisasi internasional non-pemerintah, gerakan-gerakan sosial, perusahaan multinasional dan individu sekalipun (Hermawan, 2007).

Terdapat beberapa pakar atau ahli yang mengemukakan mengenai definisi dari hubungan internasional salah satunya ialah Karen Mingst yang dijelaskan di dalam bukunya yang berjudul "*Penghantar Hubungan Internasional*" yang menyatakan bahwa "Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara bagian, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, entitas sub-nasional seperti pemerintah daerah dan individu" (Wijatmadja & Ambarwati, 2016).

### **2.1.2 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional atau *national interest* dilandasi oleh keterbatasan suatu negara untuk mencapai target ataupun rencana

yang diinginkan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakter, budaya, sejarah, sumber daya dan berbagai hal yang dianggap berbeda dari negara lain. Kepentingan nasional didefinisikan pertama kali oleh Hans J Morgenthau sebagai salah satu instrument untuk meraih kekuasaan yang dimana kekuasaan ini akan menjadi sebuah keuntungan negara agar dapat mempengaruhi dan bahkan mengontrol negara lain. Sebagai orang pertama yang mengungkapkan mengenai kepentingan nasional, Morgenthau juga mengkonsepkan kepentingan nasional sebagai kemampuan yang dimiliki negara demi mempertahankan dan melindungi identitas baik secara fisik, kultur ataupun politik negaranya. Oleh karena itu, hubungan diplomasi yang terjalin antar negara perlu bersifat positif agar kepentingan nasional dapat terus tercapai dalam jangka waktu panjang (Faiza, 2020).

Kepentingan nasional di satu negara dapat berbeda dengan negara lain dan dapat pula berubah karena dipengaruhi oleh faktor demografi, karakter, budaya, hingga sejarah dapat mempengaruhi kepentingan nasional yang dimiliki sebuah negara. Sehingga dalam melakukan kerjasama suatu negara akan melihat kondisi serta keuntungan yang dapat menjadi pertimbangan dalam mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama baik itu bilateral maupun multilateral tergantung pada kebutuhan negara masing-masing (Coulombis & Wolfe, 2004).

Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi di dalam dunia internasional. Sehingga dalam menciptakan sebuah interaksi yang tertib di dalam dunia internasional maka perlu adanya klasifikasi dalam pencapaian kepentingan nasional, salah satunya adalah dengan menetapkan prioritas dalam mencapai kepentingan nasional seperti yang dikemukakan oleh Robinson, dimana terdapat berbagai klasifikasi dari kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, merupakan kepentingan nasional yang mencakup perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Setiap negara memiliki *primary interest* dan kepentingan ini dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, merupakan kepentingan yang cukup memberikan kontribusi penting selain dari kepentingan primer, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekuatan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *General Interest*, merupakan kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam perdagangan.

5. *Specific Interest*, merupakan kepentingan yang tidak termasuk dalam *general interest*, namun dapat menjadi turunan dari kepentingan tersebut (Couloumbis & Wolfe, 2004).

Kepentingan nasional dapat didefinisikan melalui beberapa kriteria yaitu:

1. Kriteria ekonomi yang dimana kebijakan dapat memperkuat posisi ekonomi negara sehingga masuk ke dalam kepentingan nasional.
2. Kriteria ideologi yaitu mempengaruhi negara dalam memandang dunia dan dalam memdefinisikan kepentingan nasionalnya.
3. Kriteria keamanan militer dimana negara melihat keamanan sebagai penentu kepentingan karena kekuatan yang memainkan peran penting dalam hubungan internasional.
4. Kriteria moralitas dan legalitas yang merupakan suatu isu yang menjadi perdebatan dalam menentukan kepentingan nasional.
5. Kriteria lain-lain yang meliputi masalah budaya, etnik, ras, dan lain sebagainya (Wijatmadja & Ambarwati, 2016).

Kepentingan nasional menjadi sangat penting dalam menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep ini menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional menjadi sebuah upaya negara dalam

mendapatkan *power* (kekuasaan), yang dimana *power* merupakan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hingga mengendalikan negara lain. Penggunaan *power* atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional (Perwita & Yani, 2005).

Kepentingan nasional Indonesia sebagai sebuah negara tentulah bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menggerakkan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional yang secara khusus diberikan dan diperayakan kepada Kementerian Luar Negeri terkait hubungan antar bangsa. Kepentingan khusus tersebut meliputi:

- a. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama Internasional dalam bidang multilateral,
- b. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan nasional, pemajuan dan perlindungan HAM, kerjasama kemanusiaan serta meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, dan komoditi,

- c. Perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerjasama multilateral.

Tujuan nasional Indonesia secara umum juga telah tercantum pada pembukaan UUD 1945 di alinea 4 yang menyebutkan bahwa kepentingan nasional yang dimaksud termasuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Nanggala. et al., 2018).

### **2.1.3 Hubungan Bilateral**

Hubungan antar bangsa terjalin melalui interaksi antar aktor-aktornya yang memunculkan hubungan berupa kerjasama dalam hubungan bilateral, regional, maupun multilateral. Suatu negara tidak akan bisa untuk berdiri sendiri dalam membangun negaranya tanpa adanya bantuan dari negara lain baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik (Rudy, 2002).

Hubungan bilateral juga dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton yang mengartikannya sebagai hubungan di antar negara yang terjadi di dunia yang pada dasarnya tidak lepas dari tujuan kepentingan nasional yang dimiliki masing-masing negara. Kepentingan nasional menjadi sebuah unsur penting yang meliputi

beberapa hal seperti kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, keberlangsungan hidup warga negara, dan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, hubungan bilateral mengarah pada hubungan yang terjalin melalui berbagai aspek seperti politik, ekonomi maupun budaya yang melibatkan dua negara ataupun lebih. Hubungan bilateral kini telah banyak dijalin melalui diplomasi khususnya antar budaya (Djelantik, 2008).

Hubungan bilateral juga dapat digambarkan sebagai hubungan timbal balik antara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat, dan aktor yang berperan dalam pelaksanaan interaksi dalam hubungan bilateral. Dalam prosesnya hubungan bilateral dapat ditentukan melalui beberapa motif atau tujuan, yaitu untuk menjaga kepentingan nasional, untuk menciptakan dan menjaga perdamaian, dan terakhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi nasional (Perwita & Yani, 2011).

Hubungan Bilateral berkaitan dengan kerjasama yang terjadi di antara dua negara atau dua pihak yang saling berkepentingan. Kusumo Hamidjojo berpendapat bahwa hubungan bilateral menurutnya merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara yang dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis namun dengan tujuan utama yaitu untuk menciptakan perdamaian, melalui adanya



kesamaan politik, kebudayaan hingga struktur ekonominya (Faiza, 2020).

Untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara tidak akan lepas dari berhubungan dengan negara lain atau bahkan menjalin kerjasama. Indonesia sendiri telah menjalin hubungan bilateral dengan 162 negara di seluruh dunia, salah satu negara mitra kerja sama yang dipilih Indonesia adalah Prancis (Kemlu, 2019). Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Prancis mencakup beberapa bidang salah satunya dalam bidang kebudayaan. Demi menjalin interaksi dan kerjasama yang baik dengan negara yang dijuluki sebagai kota mode ini, Indonesia membuka komunikasi antar aktor agar dapat terjalin kerjasama yang komersial bagi kedua negara. Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan citra positif Indonesia dan juga memperkuat pengakuan masyarakat akan budaya Indonesia di dunia.

#### **2.1.4 Diplomasi**

Diplomasi merupakan suatu seni dalam berunding atau bernegosiasi yang dilakukan oleh seorang diplomat sebagai perwakilan negara dengan negara ataupun pihak lain demi mencapai suatu kesepakatan atau tujuan tertentu. Diplomasi juga dapat didefinisikan sebagai salah satu cara seorang diplomat dalam

bernegosiasi untuk menyampaikan sebuah pesan yang memiliki tujuan khusus. Istilah Diplomasi sangat melekat pada hubungan antar negara yang direalisasikan dalam kegiatan politik luar negeri suatu negara. Maka dari itu, diplomasi dapat menjadi media dalam mencapai kepentingan nasional suatu bangsa. (Wijatmadja & Ambarwati, 2016).

Diplomasi merupakan salah satu bentuk “*Soft Power*” yang digambarkan dalam konsep kekuasaan (*power*) sebagai sebuah kemampuan, tingkat sumber daya yang dimiliki, dan pengaruh dalam permasalahan internasional. Dalam konsep *power* terdapat dua perangkat yang digunakan dalam mencapai kepentingan nasional yang pertama adalah *hard power* yang dalam pelaksanaannya menggunakan tekanan atau kekuatan militer sedangkan yang kedua adalah *soft power* yang bertolak belakang dari cara sebelumnya yang dalam pelaksanaannya lebih menggunakan kekuatan budaya dan ekonomi. Sehingga diplomasi dapat dikatakan sebagai bagian penting dalam *soft power* dalam hal ini (Adriansyah, 2020). Diplomasi menjadi kekuatan yang dapat menarik individu hingga negara melalui kekuatan emosional seperti membangun hubungan atau ikatan melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya (Nye, 2010).

Dalam buku yang berjudul “*Soft Power: The Means to Success in World Politics*”, Joseph Nye menjelaskan mengenai *soft power* dalam sebagai kemampuan suatu negara dalam mencapai sesuatu yang diinginkan dengan memunculkan ketertarikan dan bukan dari tekanan atau pembayaran (*payment*) yang diciptakan melalui tujuan politik, daya tarik budaya, dan kebijakan suatu negara. *Soft power* dapat dilakukan oleh semua negara untuk meningkatkan pengaruhnya dalam politik internasional (Nye, 2004).

Diplomasi juga menjadi media yang berperan sangat penting dalam pemenuhan kepentingan nasional suatu negara saat menjalin hubungan bilateral maupun multilateral. Diplomasi dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi, dari proses interaksi di antara dua atau banyak negara hingga aktor non negara dalam melaksanakan tujuan politik luar negeri negaranya dan mencapai kepentingan nasional. Sehingga diplomasi memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah-masalah internasional, politik luar negeri, hubungan luar negeri, implementasi hubungan luar negeri, hingga komunikasi dan negosiasi antar negara (Faiza, 2020).

Sebagai sebuah negara yang memiliki kepentingan nasional Indonesia mengarahkan kepentingan tersebut pada kebijakan dan strategi diplomasi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya. Pemerintah Indonesia mendorong seluruh perwakilan

diplomasi di luar negeri agar mempererat hubungan bilateral untuk dapat mempromosikan budaya nasional. Dengan berdasarkan kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia terhadap Prancis, maka perlu adanya sarana untuk meningkatkan opini serta citra positif Indonesia di mata masyarakat Prancis. Opini serta citra positif terhadap negara yang terbentuk menjadi salah satu indikator keberhasilan Indonesia dalam mempromosikan potensi kebudayaan yang dimiliki Indonesia guna mencapai sasaran strategis yang telah dirancang oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu, 2019).

Diplomasi juga berperan penting dalam proses pembangunan dan kemajuan negara di dalam berbagai sektor yang dapat dilihat melalui implementasi lima sektor yang berkontribusi dalam meningkatkan daya saing global dan membuka pangsa pasar ekspor global. Dalam mempercepat pembangunan negara, diplomasi memiliki peran penting pada pembangunan industri manufaktur nasional melalui berbagai sektor seperti (i) sektor makanan dan minuman, (ii) tekstil dan pakaian jadi, (iii) otomotif, (iv) kimia dan (v) elektronik. Dengan pelaksanaan diplomasi, suatu negara dapat mempromosikan serta membangun kerjasama dan membuka peluang investasi kepada pihak luar di berbagai bidang yang akan mendorong pembangunan negara (Putri & Ginanjar, 2018).

Diplomasi digunakan oleh negara dalam merumuskan strategi untuk mencapai kepentingan nasional dalam kondisi politik global yang saat ini tengah menghadapi perubahan global. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kinerja politik yang kompeten dari berbagai aktor, baik itu pemerintah, organisasi, maupun individu yang mewakili negara untuk berinteraksi dalam sistem internasional. Melalui praktik diplomasi dapat dilihat beberapa fungsi utamanya. Pertama, diplomasi sebagai alat untuk berinteraksi antar negara. Kedua, diplomasi sebagai alat untuk merundingkan sebuah kesepakatan. Ketiga yaitu sebagai alat dalam mengumpulkan berbagai informasi dari luar negeri untuk mencapai kepentingan negara. Keempat, untuk menghindari atau meminimalkan gesekan yang terjadi dalam hubungan internasional, dan fungsi terakhir yaitu sebagai alat untuk melambungkan keberadaan bangsa dengan maksud mempertahankan serta melindungi identitas suatu negara (Triwahyuni, 2022).

### **2.1.5 Diplomasi Kebudayaan**

Diplomasi kebudayaan didefinisikan sebagai upaya dari pemerintah hingga berbagai aktor non-negara dalam merealisasikan hubungan dengan pihak lain ataupun negara sasaran dengan menggunakan kebudayaan untuk dapat mencapai tujuan ataupun target tertentu. Diplomasi budaya dianggap cukup efektif dalam

memenuhi kepentingan nasional karena pelaksanaannya tidak dilakukan secara paksa melainkan melalui nilai-nilai seni dari budaya yang diajarkan dan dikenalkan. Konsep diplomasi budaya sendiri ditujukan guna mempengaruhi pandangan serta citra suatu negara terhadap publik ataupun pihak lain dengan tujuan untuk mencapai ataupun mendukung suatu kebijakan negara. Diplomasi melalui kebudayaan merupakan upaya dinamis yang dilakukan menggunakan konten budaya demi kepentingan persatuan, kesatuan bangsa, dan pengakuan serta penghormatan luar negeri melalui kerjasama dan pertukaran budaya. Sehingga dengan demikian, setiap individu demi kepentingan bangsanya memiliki kewajiban untuk melaksanakannya demi meningkatkan persatuan, kesatuan bangsa, dan kesejahteraan rakyat dan citra budaya suatu negara kepada masyarakat internasional (Adriansyah, 2020).

Menurut Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, definisi diplomasi kebudayaan dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *“Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia”* bahwa diplomasi kebudayaan merupakan salah satu dari banyak macam diplomasi yang memiliki arti atau pengertian sebagai usaha negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara dengan menggunakan aspek kebudayaan yang terbagi menjadi dua, yang sifatnya mikro yaitu ilmu pengetahuan, pendidikan, kesenian, olahraga dan yang bersifat makro

seperti propaganda yang mengikutsertakan masalah ideologi, nasionalisme, globalisasi dan lain sebagainya (Warsito & Kartikasari, 2007).

Diplomasi budaya dapat dilaksanakan oleh berbagai aktor yang mencakup berbagai kalangan. Hampir seluruh kalangan dapat menjadi aktor dalam diplomasi budaya, bukan hanya aktor negara tetapi juga aktor non negara seperti, kelompok masyarakat atau komunitas, individu bahkan seluruh warga negara dapat menjadi bagian dari aktor diplomasi budaya sehingga hubungan diplomasi budaya antar bangsa atau negara tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup pemerintahannya saja. Adapun tujuan dari diplomasi budaya yaitu untuk mempengaruhi pandangan negara ataupun pihak lain yang bertujuan untuk mendukung suatu kebijakan politik luar negeri tertentu, hal ini dikarenakan sasaran diplomasi budaya adalah mempengaruhi pandangan terhadap citra negara baik itu pada tingkat nasional ataupun internasional (Warsito & Kartikasari, 2007).

Diplomasi kebudayaan berdasarkan Pedoman Diplomasi Budaya jika dilihat berdasarkan bentuknya maka meliputi:

1. Pameran budaya, suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk menampilkan ragam kebudayaan yang dipersembahkan di ruang pertunjukkan yang meliputi artefak, seni lukis, seni pertunjukan, seni sastra, seni media baru, pakaian tradisional, kuliner, dan

produk kebudayaan lain yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia.

2. Pertukaran budaya, suatu kegiatan berbagi pengalaman yang berhubungan dengan budaya dan penyebarluasan pengetahuan tata kelola kebudayaan yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia.
3. Misi kebudayaan, suatu bentuk tugas yang kemudian diberikan kepada delegasi yang dikirim untuk melaksanakan pementasan atau pertunjukan kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia.
4. Festival, suatu kegiatan perayaan kebudayaan bersifat kolosal yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri dan dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia.
5. Seminar, suatu kegiatan dari forum ilmiah untuk membahas suatu topik kebudayaan yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia dan melibatkan pakar baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Lokakarya, suatu kegiatan dalam forum pertemuan yang dihadiri oleh para ahli yang membahas topik tertentu dalam bidang kebudayaan disertai pelatihan singkat yang bertujuan



memperoleh acuan dan dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia.

7. Konferensi, suatu kegiatan dalam forum pertemuan ilmiah yang membahas topik tertentu dalam bidang kebudayaan yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia dan melibatkan peserta dalam jumlah besar.
8. Pelatihan kebudayaan, suatu kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek kebudayaan yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia melalui pengiriman tenaga ahli ke berbagai negara.
9. Publikasi budaya, suatu kegiatan penyebaran informasi yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia melalui berbagai bentuk media dan produk penerbitan.
10. Pembangunan Rumah Budaya Indonesia, suatu kegiatan yang mendorong terbentuknya pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri yang dinilai memiliki peran strategis bagi kepentingan diplomasi budaya Indonesia dan.
11. Pengadaan peralatan kebudayaan, suatu kegiatan yang dipersiapkan untuk mengurus pengadaan dan pengiriman berbagai sarana visualisasi kebudayaan ke pihak terkait melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (Pedoman

Diplomasi Budaya, 2018. Diakses melalui <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/pedoman-diplomasi-budaya/>)

Adapula bentuk diplomasi kebudayaan dalam hubungan internasional dalam bentuk berbagai kegiatan, pertama yaitu pameran yang dimana akan menampilkan atau memamerkan segala sesuatu mengenai kebudayaan, tradisi, hingga keunikan yang dimiliki suatu bangsa kepada bangsa lain. Diplomasi kebudayaan melalui pameran ini dapat dikatakan sebagai diplomasi kebudayaan konvensional. Kedua yaitu propaganda yang dilakukan dengan menyebarkan luaskan suatu informasi mengenai kebudayaan suatu bangsa kepada bangsa lain namun dilakukan tidak secara langsung atau melalui media perantara. Ketiga yaitu melalui kompetisi atau pertandingan yang menyiratkan kebudayaan di dalamnya sehingga mendorong pesertanya untuk memahami dan mengetahui mengenai kebudayaan tersebut. Keempat yaitu melalui penetrasi atau perembesan yang dilakukan secara damai kepada bangsa lain melalui berbagai bidang seperti bidang perdagangan, militer hingga ideologi. Kelima yaitu melalui negosiasi yang berkaitan dengan kebudayaan dari suatu bangsa untuk saling memperkenalkan, mengakui, menghormati dan menghargai kebudayaan masing-masing dari negara tersebut. Keenam yaitu melalui pertukaran ahli yang mencakup kegiatan seperti

kerjasama beasiswa antar negara hingga pertukaran ahli dalam bidang tertentu. (Warsito & Kartikasari, 2007).

#### **2.1.6 Batik**

Batik merupakan suatu kebudayaan milik bangsa Indonesia yang berasal dari pengolahan gambar pada kain yang dibuat dengan menggunakan lilin atau malam sebagai alat mewarnai (Prasetyo, 2013). Batik menjadi salah satu dari kebudayaan yang berkembang pada lingkup masyarakat Indonesia. Kata ‘Batik’ memiliki beberapa makna dan pengertian. Batik berasal dari dari bahasa jawa yaitu “amba” yang artinya menulis dan “nitik” yang artinya titik. Gabungan kedua kata tersebut memiliki arti menulis dengan titik yang mana proses pembuatan batik sendiri dituliskan pada kain dengan menggunakan canting yang di ujungnya berukuran kecil yang memberikan kesan menulis dengan titik-titik. (Trixie, 2020).

Menurut Warsito setidaknya ada dua pengertian tentang batik, yang pertama yaitu batik merupakan teknik tutup celup atau *resist technique* dalam pembentukan gambar pada kain menggunakan lilin sebagai perintang dan zat warna bersuhu dingin sebagai pewarna pada kain. Pengertian kedua yaitu batik merupakan sekumpulan desain yang digunakan dalam membatik yang kemudian berkembang menjadi desain yang memiliki ciri khas tersendiri walaupun desain

tersebut tidak lagi dibuat di atas kain dan tidak lagi menggunakan lilin (Musman & Arini, 2011).

Batik sebagai kain tradisional nusantara yang merupakan kerajinan asli daerah yang banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Madura, Tasikmalaya, Cirebon hingga Bali. Batik bahkan dapat ditemukan di beberapa daerah di luar Jawa seperti daerah Sumatera, hingga Papua. Berdasarkan sejarah tentang adanya batik di Indonesia, batik dikenal pertama kali sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang secara terus-menerus kepada kerajaan dan pemimpin-pemimpin berikutnya. Mulai meluasnya batik di Indonesia khususnya di suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 yang dimana batik yang dihasilkan kala itu masih dalam bentuk batik tulis hingga awal abad ke-20 (Prasetyo, 2013).

Dimasa lampau para wanita di suku Jawa memanfaatkan keterampilan membatik yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan sehingga menjadikan kegiatan membatik sebagai pekerjaan eksklusif para wanita di suku Jawa pada masa itu. Sejak berkembangnya industrialisasi, berbagai teknik baru yang lebih sederhana telah banyak muncul dan digunakan. Batik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam peristiwa

penting maupun rutinitas harian seperti halnya menggendong bayi, simbolisasi acara pernikahan, upacara adat, dekorasi, hingga acara kenegaraan (Hakim, 2018).

Menurut Konvensi Batik Internasional di Yogyakarta pada tahun 1997, batik merupakan proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan menggunakan lilin batik atau malam sebagai alat perintang warna. Pada pembuatan batik, lilin batik atau malam diaplikasikan pada kain untuk mencegah penyerapan warna pada saat proses pewarnaan (Prasetyo, 2013). Dalam sejarahnya batik dikenal sejak abad XVII, yang saat itu batik tidak ditulis dan dilukis di atas kain melainkan masih di atas daun lontar. Pada awalnya motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman yang ada di daerah setempat namun kini batik berkembang beralih pada berbagai macam motif seperti menyerupai awan, relief candi, wayang beber dan banyak lagi menyesuaikan daerah asalnya. Batik bukan hanya dikenal sebagai seni yang dilukis di atas sebuah kain, namun memiliki filosofis yang terkandung di dalam motif tersebut (Lusianti & Rani, 2012).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

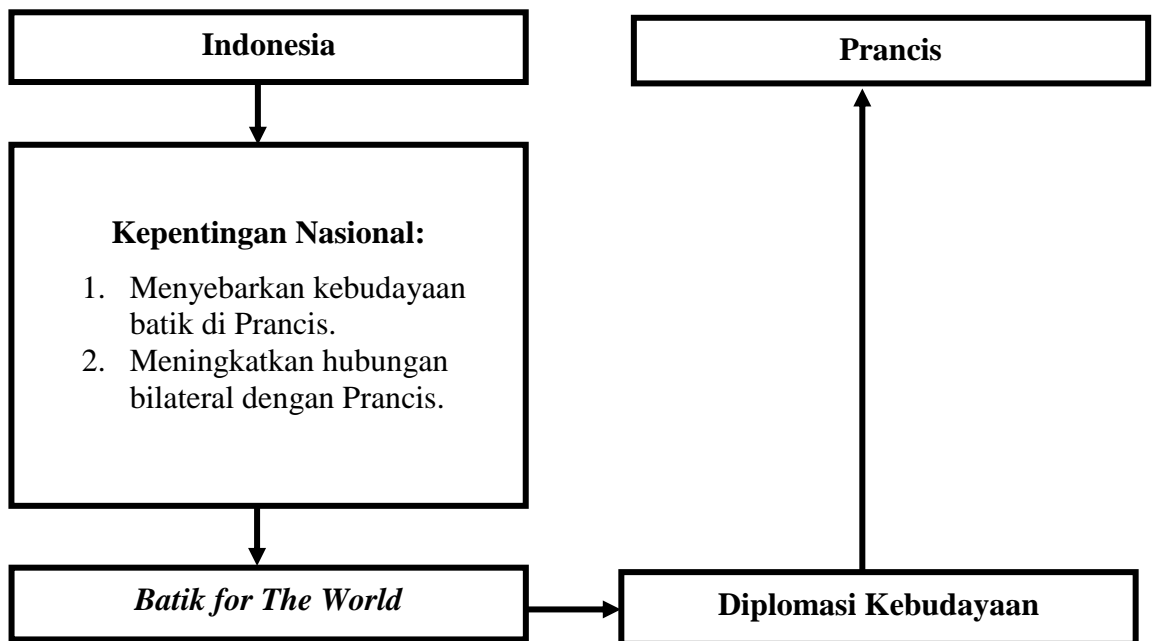
Hubungan internasional merupakan studi yang mempelajari mengenai interaksi yang terjadi antar negara. Pada perkembangannya, interaksi tersebut tidak hanya dibatasi dengan interaksi tradisional yang

dilakukan oleh negara atau pemerintah melainkan juga aktor non-negara seperti kelompok, komunitas, hingga individu dapat melakukan interaksi karena memiliki peranan dalam membangun hubungan internasional. Ada kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara dalam setiap terjalinnya hubungan antar negara. Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing karena penting bagi suatu negara untuk membangun, mempertahankan, dan menjaga eksistensinya di dalam maupun di luar negeri. Untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dapat menggunakan diplomasi yang diimplementasikan melalui program-program hingga kerjasama antar negara.

Pada penjabaran yang lebih konkrit, yakni dalam konteks penelitian ini, Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan Prancis. Hubungan antara Indonesia dengan Prancis sudah terjalin sejak tahun 1950 melalui berbagai aspek kerjasama yang dilakukan sehingga kini menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia yang memprioritaskan lima pilar yaitu perdagangan dan investasi, pendidikan, industri pertahanan, kebudayaan dan pariwisata, serta pengurangan dampak perubahan iklim. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis dalam bidang kebudayaan juga terjalin dengan baik melalui penandatanganan *Agreement on Cultural and Technical Cooperation* pada tanggal 20 September 1969. Hubungan bilateral di antara kedua negara ini terjalin cukup erat sehingga tidaklah sulit bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui diplomasi di Prancis. Dengan diplomasi Indonesia dapat memanfaatkan potensi yang

dimiliki negara yang kini menjadi salah satu instrumen yang kuat dalam melakukan diplomasi yaitu budaya. Salah satu budaya Indonesia yang telah diakui secara internasional ialah batik, melalui kebudayaan inilah Indonesia membesarkan citra dan namanya.

Batik telah menarik perhatian masyarakat internasional khususnya masyarakat Prancis yang memanglah tidak asing dengan industri fesyen. Dengan melihat kesempatan yang ada, KBRI Paris mengorganisir kegiatan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Ekonomi Kreatif untuk memperkenalkan batik. Kegiatan ini tidak hanya dijalankan oleh Pemerintah Indonesia namun juga oleh aktor lain yakni desainer kontemporer terkemuka Indonesia yaitu Oscar Lawalata, Edward Hutabarat, dan Denny Irawan yang bekerja sama dalam memajukan industri batik Indonesia. Kegiatan ini memperkenalkan batik Indonesia melalui *Batik for The World* dengan cara membawa batik secara modern kepada masyarakat Prancis melalui berbagai kegiatan yang dilakukan guna mengedukasi serta mempromosikan batik.



**Bagan 2.2** Kerangka Pemikiran

**Sumber:** Diolah oleh Peneliti